



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 469 /MK.5/2018
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penundaan Penerapan Ketentuan Paragraf 26 dan
Paragraf 82 PSAP 13

15 Januari 2018

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama pada
Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU
2. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
3. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
4. Para Kepala KPPN
5. Para Pemimpin Satker BLU
di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan PSAP Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum terutama perlakuan akuntansi atas transaksi Kerja Sama Operasional (KSO) pada Badan Layanan Umum (BLU) dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan BLU perlu menunda penerapan ketentuan Paragraf 26 (Perlakuan KSO pada LRA) dan Paragraf 82 (Perlakuan KSO pada LO) PSAP 13 sampai dengan penyusunan laporan keuangan BLU Tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perbendaharaan,


Marwanto Harjowiryo
NIP 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Menteri Keuangan
3. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Direktur Pembinaan PK BLU
6. Direktur Sistem Perbendaharaan
7. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Lampiran Surat Menteri Keuangan

Nomor: S- ~~469~~ /MK.5/2018

Tanggal: 15 Januari 2018

**DAFTAR KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN YANG
DALAM WILAYAH TUGASNYA TERDAPAT BLU**

1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
9. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
10. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
12. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
13. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
14. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
15. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
16. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
18. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
19. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
20. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
21. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
22. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
23. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
24. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
25. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
26. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
27. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua